

**KONTRIBUSI RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE
PERIODE 2009-2018**

SKRIPSI

**NOVIA SASMITA
NIM 105710226315**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku, Bapak Mustafa dan Ibu Rahmatia yang telah melimpahkan kasih sayang dan cintanya, doa yang tak pernah putus, serta kerja keras ikhlas tanpa pernah lelah untuk memberikan yang terbaik bagi kesuksesanku.

Almamaterku tercinta khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhamadiyah Makassar

Temanku terkasih atas motivasi dan semangatnya

Para dosen, karyawan dan segenap pihak kantor Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bone yang telah banyak membantu.

MOTTO HIDUP

“Setiap usaha yang kita lakukan baik kecil maupun besar jika dilakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka itulah yang akan membawa kita pada kesuksesan ”

“Every effort we do whether small or large if done sincerely and whole heartedly, then that is what will lead us to success”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Periode 2009-2018".
Nama Mahasiswa : Novia Sasmita
No Stambuk/NIM : 105710226315
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin tanggal 30 September 2019.

Makassar, 30 September 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muchran BL, M.Si.
NIDN:0024085601

A. Nur Achsanuddin UA, SE., M.Si
NIDN:0920098604

Diketahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua,
Prodi Ekonomi Pembangunan

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Hj. Naldah, SE., M.Si
NBM: 71055



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Novia Sasmita Nim : 105710226315, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0007/SK Y/60201/019004/2019M Tanggal 01 safar 1441 H / 30 September 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar,

Makassar, 01 Safar 1441H
30 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM. (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM. (.....)
2. Dr. H. Muh. Ikrani Idrus, M.Si. (.....)
3. Dr. Edi Jusriadi, SE., MM. (.....)
4. Nasrullah, SE., MM. (.....)

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM 903078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Sasmita

Stambuk : 105710226315

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan Judul : "Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Periode 2009-2018".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 September 2019

Yang membuat Pernyataan,

Novia Sasmita



Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis


Ismail Rasafiong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua,
Prodi Ekonomi Pembangunan


Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710551

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan slaam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Periode 2009-2018”.

Skripsi yang penulis ini buat bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Mustafa dan ibu Rahmatia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat serta doa restu atas keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM.**, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M. Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muchran BL, M. Si., selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak A. Nur Achsanuddin UA, SE., M. Si., selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terkhusus kepada kakak sepupu Dr. Muh. Hasrul, SH., MH., dan Nila Martini, S. Pd., yang sudah seperti orang tua saya sendiri selama di Makassar yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama penulis menjalani perkuliahan,
10. Tak lupa kepada sahabat, keluarga dan saudaraku, Filmiani HS, Husnan Ridha dan Fahima yang selalu membantu selama proses penelitian di Bone.

11. Teman-teman SG team (Uda, Ikka, Irma, Indah, Nisa, Ismi, Andif, dan Bella) yang selalu menjadi tempat ternyaman berbagi kisah dan kasih selama bersama-sama dalam studi ini.
12. Senioriku di jurusan yaitu kak Andi Hakib, SE., yang tak pernah bosan merespon setiap pertanyaan-pertanyaan terkait penulisan skripsi.
13. Terima kasih teruntuk semua pihak di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 22 September 2019

Penulis

ABSTRAK

NOVIA SASMITA, Tahun 2015, Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Periode 2009-2018, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassa. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Muchran BL dan Pembimbing II A. Nur Achsanuddin UA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bone periode 2009 sampai 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan penyajian data didominasi dalam bentuk angka dan analisis data bersifat statistik. Data yang diolah adalah data tim seris dari tahun 2009 sampai tahun 2018 yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik kabupaten Bone. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan berupa buku, artikel dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menghitung retribusi objek wisata (X) dibagi Pendapatan Asli Daerah (Y) kemudian dibagi 100% pada tahun 2009=0,79%, 2010=0,83%, 2011=0,84%, 2012=0,40%, 2013=0,27%, 2014=0,15%, 2015=0,14%, 2016=0,12%, 2017=0,10%, 2018=0,35%. Berdasarkan hasil analisis dan pengumpulan data retribusi objek wisata dan pendapatan asli daerah pada tahun 2009 sampai tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa Kontribusi retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci : Retribusi, Objek Wisata, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

NOVIA SASMITA, 2015, *Contribution of Tourism Attraction Retribution Towards Local Revenue of district Bone Period 2009-2018*, Thesis of Economic Development Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassa. Supervised by Advisor I H. Muchran BL and Advisor II A. Nur Achsanuddin UA.

This study aims to determine how much the contribution of tourist attraction fees to the original income of the district of Bone for the period 2009 to 2018. The type of research used is a quantitative research method with the presentation of data dominated in the form of numbers and statistical data analysis. The data processed is the Seris team data from 2009 to 2018 obtained from the office of the Central Statistics Agency of Bone district. Data collection techniques used in research are library research in the form of books, articles and others related to research. While the data analysis technique used is a simple linear regression analysis by calculating tourist attraction fees (X) divided by Regional Original Revenue (Y) then 100% divided by 2009=0,79%, 2010=0,83%, 2011=0,84%, 2012=0,40%, 2013=0,27%, 2014=0,15%, 2015=0,14%, 2016=0,12%, 2017=0,10%, 2018=0,35%. Based on the results of the analysis and data collection of tourist attraction fees and local original income in 2009 to 2018 it can be concluded that the contribution of tourist attraction fees on local original income has a positive and significant effect.

Keywords: Retribution, Tourism Objects, Regional Original Revenue.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Teori	10
1. Pendapatan Asli Daerah	10
2. Teori Retribusi	14
3. Objek Wisata	22
4. Pendapatan	16
B. Tinjauan Empiris	30
C. Kerangka Pikir	32
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	33

A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Distribusi Kunjungan wisatawan	5
Tabel 1.2 : Jumlah Wisatawan	6
Tabel 1.3 : Kontribusi Wisata Terhadap PAD	8
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 : Ketinggian Daerah	37
Tabel 4.2 : Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara	39
Tabel 4.3 : Jumlah Desa/Kelurahan	40
Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk	43
Tabel 4.5 : Objek Wisata Kabupaten Bone	45
Tabel 4.6 : Jumlah Kunjungan Wisatawan	46
Tabel 4.7 : Realisasi Pendapatan Pemerintah	49
Tabel 4.8 : Pendapatan Asli Daerah	51
Tabel 4.9 : Retribusi Objek Wisata	53
Tabel 4.10 : Hasil Analisis	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kabupaten Bone	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan, juga disebut Nusantara memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, karena keadaan geografisnya sangat menunjang. Aspek-aspek lingkungan yang sangat kaya dan beragam manfaat untuk dikembangkan sebagai aset pariwisata. Dikemukakan oleh (Arjana., 2008), (Arjana., 2014) mendeskripsikan Indonesia sebagai sebuah negara, sebuah teritori, memiliki karakteristik dan unik secara geografis.

Kekayaan etnik, subetnik, merupakan budaya-budaya khas, bentuk budaya inilah yang berpotensi dikembangkan menjadi objek wisata yang menjadi unggulan daerah. Seperti dikemukakan (Rahim., 2013), Indonesia memiliki 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki sumberdaya pariwisata, baik menyangkut keindahan dan keunikan panorama alam maupun keindahan dan keunikan aspek budaya masyarakat Indonesia.

Peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi sangat positif. Pariwisata adalah sistem yang multikompleks, dengan berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi antar sesama (Pitana, 1999;2002a) Dalam pengembangan pariwisata suatu negara, wisatawan dalam negeri disebut juga wisatawan domestik (*Domestic Tourism*) atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama wisatawan nusantara (Wisnu). Wisatawan domestik tetap berdampak ekonomi pada destinasi wisata. Disamping itu, berkembangnya wisnu merupakan indikasi meningkatnya jumlah kelas

menengah sehingga memiliki dampak yang besar dalam rangka membangun karakter kebangsaan agar menjadi semakin solid (Rahim., 2013).

Semua pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia memiliki program untuk pengembangan pariwisata, yang dibuktikan dengan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki bidang tugas pengelolaan atau pengembangan pariwisata. Sebab semua daerah memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang juga serba multi.

Faktor yang menjadi kendala besar dalam pengembangan pariwisata daerah itu yang terutama adalah ketersediaan infrastruktur, baik jalan, jembatan, Bandar udara, pelabuhan laut termasuk sarana transportasi, boleh dikatakan kendala yang sangat mempersulit aksesibilitas wisatawan menuju destinasi yang diinginkan (Arjana., 2016).

Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (HAW Widjaja., 2005).

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah tentunya dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang

seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Otonomi daerah memang dapat membawa dampak positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah implan karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah (Soraya Rasyid., 2011).

Menurut (Halim., 2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut (Halim dan Nasir., 2006), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Berdasarkan *Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004* tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “*pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan atau dapat dijadikan andalan bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena pada sektor ini memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Pesatnya perkembangan industri pariwisata akan berimbas pada penerimaan yang diterima oleh daerah. Adapun penerimaan dari sektor pariwisata bersumber dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan retribusi objek wisata berupa karcis masuk kedalam objek wisata tersebut. Penerimaan inilah yang nantinya menjadi salah satu penambahan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, secara geografik Sulawesi Selatan dikitari oleh laut, sebelah Barat dibatasi selat Makassar, sebelah Selatan oleh laut Flores, sebelah Tenggara oleh selat Bone dan sebelah Utara oleh provinsi Sulawesi Tengah, karena itu, Sulawesi Selatan dapat juga disebut memiliki posisi maritim.

Tabel 1.1

**DISTRIBUSI KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA DAN MANCANEGARA
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015**

Kabupaten/Kota	2015	
	Distribution Wisatawan Nusantara	Distribusi Wisatawan Mancanegara
Kepulauan Selayar	43696	3647
Bulukumba	144063	3932
Bantaeng	226850	5325
Jeneponto	3632	54
Takalar	31363	2232
Gowa	125625	1676
Sinjai	28828	489
Maros	331515	15422
Pangkep	39114	1306
Barru	9479	883
Bone	25195	729
Soppeng	54462	359
Wajo	34447	2405
Sidrap	4587	392
Pinrang	8020	262
Enrekang	101767	6734
Luwu	11117	333
Tana Toraja	296136	34685
Luwu Utara	17395	499
Luwu Timur	23364	2703
Toraja Utara	286669	32763
Makassar	4967551	52436
Pare Pare	295028	16333
Palopo	18923	6174

Sumber : *BPS Sulawesi selatan 2015*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara diberbagai kabupaten/kota di Sulawesi selatan menunjukkan angka yang positif.

Berikut ini merupakan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara yang telah berkunjung ke Sulawesi selatan.

Tabel 1.2

**JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA DAN NUSANTARA DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2011-2015**

Tahun 2011-2015	Wisatawan		
	Mancanegara	Nusantara	Jumlah
2011	51749	4471632	4523381
2012	64601	4871966	4936567
2013	106584	5385809	5492393
2014	151763	5920528	6072291
2015	191773	7128826	7320599

Sumber : *BPS Sulawesi selatan dalam angka*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara dan domestik mengalami peningkatan secara positif dari tahun ke tahun.

Hal ini menggambarkan situasi perekonomian yang bagus dimana setiap perjalanan objek wisata tentu akan menguntungkan dari sisi perekonomian di daerah wisata yang dikunjungi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian di provinsi Sulawesi selatan cukup baik dan berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut *Undang-Undang No. 10/2009* tentang kepariwistaan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai macam fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata adalah salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada dipesisir Timur Sulawesi selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia, yang secara administrative terdiri dari 27 Kecamatan, 333 Desa dan 39 Kelurahan, yang letaknya 174 km kearah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4° 13'- 506' Lintang Selatan dan antara 119° 42'-120° 30' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten adalah 4.559 km² dengan batas wilayah Kabupaten Wajo dan Soppeng di sebelah Utara dan Kabupaten Sinjai dan Gowa di sebelah Selatan. Sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru. Kabupaten ini memiliki tiga jenis wilayah yaitu wilayah pegunungan (dataran tinggi), dataran rendah dan pantai (*Wisatago.com*).

Adapun potensi investasi pada sektor pariwisata di kabupaten Bone yang pertama wisata budaya seperti : *Rumah Adat Bugis (Bola Somba) di Watampone, Museum Saoraja Lapawawoi Kr. Sigeri di Watampone, Makam Raja-Raja Bone di Bukaka Watampone, Makam Raja-raja di Lalebata Lamuru.* Kedua wisata alam bersejarah, seperti : *Goa Mampu di Desa Cabbeng Kecamatan Dua BoccoE, Goa Janci di Desa Mallari Kecamatan Awangpone, Tempat Peraduan Arung Palakka dalam Goa di Kecamatan Awangpone.* dan

ketiga obyek wisata alam seperti : *Tanjung Palette di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Desa Gareccing di Kecamatan Tonra, Pantai Cappa Ujung di Kecamatan SibuluE, Permandian Bonto Jai di Kecamatan Bontocani, Permandian AlingE di Kecamatan Ulaweng, Permandian Lanca di Kecamatan TellusiattingE, Air Panas Saweng di Kecamatan Ponre, Bendungan Salomekko di Kecamatan Salomekko, Taretta Kecamatan Amali.*

Menurut kepala dinas pariwisata kabupaten Bone, Andi Ikhwan dalam wawancaranya dengan media Tribun Bone pada acara peresmian wisata Tanjung Pallette pada November 2017 lalu, ramainya kunjungan wisatawan menjadikan wisata Tanjung Pallette sebagai salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Bone.

Tabel 1.3

KONTRIBUSI WISATA TANJUNG PALLETTE TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018

No.	Kontribusi Wisata Tanjung Pallette Terhadap PAD Kab.Bone	
	Tahun	Kontribusi Wisata
-	Januari - Mei 2018	Rp.250.000.000;- Rp.500.000.000;

Sumber data : *TribunBone.com*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu kawasan wisata yang ada di kabupaten Bone yaitu wisata Tanjung Pallette memiliki peran besar dalam peningkatan perekonomian dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Bone. Hal ini bisa menjadi tolok ukur dalam meningkatkan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran pada kawasan wisata yang ada di kabupaten Bone agar semakin dikenal dan mampu menarik wisatawan untuk berkunjung

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Periode 2009-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Seberapa besar kontribusi retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bone periode 2009-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bone periode 2009-2018

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis :

Sebagai salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan menambah wawasan khususnya pada sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah

2. Bagi pemerintah :

Sebagai bahan pengambil kebijakan, pemerintah diharapkan mendapat informasi yang berguna dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata di kab. Bone.

3. Bagi pengembalian ilmu pengetahuan :

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya dan dapat pula menambah kajian mengenai pendapatan asli daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam mengelola pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah dapat merujuk pada *Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan asli daerah. Selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyatakan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misalnya : provinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Menurut (Yani, 2008), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun fungsi pajak daerah adalah fungsi anggaran, pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah. Fungsi mengatur pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah.

Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam modal, maka dapat diberikan keringanan pajak pada sektor tertentu. Dengan demikian diharapkan akan ada penyerapan lapangan

kerja. Fungsi stabilitas, pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Fungsi Retribusi Pendapatan, pajak daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah dapat diklarifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dibagi menjadi :

1) Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi sebagai berikut :

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- e) Pajak rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak kabupaten sebagai berikut :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Ahmad Yani, 2002). Berikut ini adalah subjek retribusi daerah yang dikelompokkan sebagai berikut :

Subjek retribusi umum orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. subjek retribusi data umum ini merupakan wajib retribusi umum. *Subjek retribusi jasa usaha* adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha. *Subjek retribusi perizinan tertentu* adalah orang atau badan yang memperoleh izin

tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

2. Teori Retribusi

a. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Ahmad Yani., 2002).

Menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi Daerah berbeda dengan Pajak Daerah.

Retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik Negara yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo., 2011).

Seperti halnya pajak daerah, retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menentukan bahwa objek

retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi.

Menurut Munawir, retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. (Darwin., 2010)

b. Jenis-jenis Retribusi

1) Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- k) Retribusi pengolahan limbah cair
- l) Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang
- m) Retribusi pelayanan pendidikan dan
- n) Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi pelayanan kepalabuhanan

- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - j) Retribusi penyebrangan di air dan
 - k) Retribusi penjualan produk usaha daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- a) Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c) Retribusi izin gangguan;
 - d) Retribusi trayek.

Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu sebagian diperuntukkan kepada daerah yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Bagian daerah ini ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan daerah dalam menyediakan layanan tersebut. Penggunaan bagian daerah ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (Ahmad Yani., 2002).

Unsur pembeda antara pajak dan retribusi terletak pada jasa timbal balik (kontrapretasi) yang diberikan oleh pemerintah. Menurut pengertian pajak, kontrapretasi yang diberikan pemerintah lebih bersifat umum, tidak hanya terbatas pada pembayar pajak saja. Sedangkan menurut "pengertian retribusi, kontrapretasi yang diberikan pemerintah secara langsung kepada pihak yang membayar retribusi atas jasa yang disediakan oleh Negara (Herry Purnomo., 2010).

Pungutan retribusi hanya dapat dikenakan terhadap wajib retribusi yang menikmati barang dan layanan tersebut artinya hampir tertutup kemungkinan terjadinya eksternalitas dan adanya *free riders* (orang yang berusa dalam suatu lokasi tanpa dipungut retribusi) terhadap barang dan layanan pemerintah daerah tersebut. Harga layanan yang harus dibayar oleh wajib retribusi memainkan peran penting dalam menentukan besarnya permintaan, mengurangi terjadinya pemborosan dan menjadi salah satu pedoman bagi penyediaan layanan mengenai besarnya produksi layanan yang harus dikenakan.

Proses selanjutnya penyediaan layanan menggunakan penerimaan dari hasil pungutan retribusi tersebut untuk menentukan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Sebenarnya retribusi daerah merupakan penerimaan wajib daerah baik berupa perizinan yang di perbolehkan oleh Undang-Undang. Retribusi merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (Juli Panglima Saragih., 2003).

Secara umum yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah atas segala pembayaran jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Sehingga retribusi dapat dikatakan sebagai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan dari keseluruhan harga barang atau jasa

yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Namun retribusi harus sesuai dengan peraturan daerah dimana hasilnya harus disetorkan kepada pemerintah pusat atau daerah.

Retribusi pada umumnya bersifat memaksa, tergantung apakah masyarakat mempergunakan jasa dari daerah atau tidak, dan apabila digunakan maka setidaknya masyarakat tersebut sudah terikat pembayaran karena telah mempergunakan lahan atau jasa dari pemerintah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, retribusi menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasikan pendapatan asli daerah." Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (Darwin., 2010).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka diketahui bahwa sumber-sumber retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian cetak penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, pasar, rekreasi, penjualan produksi usaha dan retribusi perizinan bangunan.

Pengolahan penerimaan daerah setidaknya harus dikelola secara cermat, tepat dan penuh dengan kehati-hatian. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat di dalam system akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Disamping hal tersebut, pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetorkan ke dalam kas pemerintah daerah dan di salahgunakan oleh petugas di lapangan.” Dan perlunya pula diteliti dengan saksama kepada masyarakat yang tidak membayar dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya dengan tegas (Mardiasmo., 2011).

Untuk itu, retribusi dapat dikatakan bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini menjadi jelas bahwa pungutan yang dibebankan oleh pengelola terhadap masyarakat dapat dikatakan sebagai retribusi karena hasil dari penarikan dana tersebut disetorkan kepada pemerintah yang kemudian pemerintah mengelolanya dengan melakukan perbaikan disetiap ruang terbuka dan tertutup yang lokasinya dikelola langsung oleh pemerintah baik itu pusat, daerah, kecamatan, dan atau-pun desa tertentu (Ahmad Yani., 2002).

Sebenarnya tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Untuk itu, dalam penetapan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi ataupun badan atau secara luas yaitu masyarakat yaitu tingkat perkalian jumlah penggunaan jasa dan tarif retribusi. Maka disimpulkan bahwa besarnya tarif yang digunakan adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang (Darwin., 2010).

3. Objek Wisata

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Menurut (Koen Meyers, 2009) Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah

melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya. Sesuai dengan potensi yang ada pada suatu negara, maka timbullah beranekaragam jenis dan macam pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan yang akhirnya mempunyai ciri khasnya tersendiri.

Pariwisata harus dibedakan untuk keperluan perencanaan dan pengembangan dan dari segi ekonomi pemberian klasifikasi tentang jenis pariwisata merupakan hal yang sangat penting. Pembangunan industri pariwisata di Indonesia berkembang sangat pesat. Terlihat dengan semakin beragamnya jenis-jenis pariwisata yang ada. Jenis-jenis pariwisata tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Wisata Budaya

Hal ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan, untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni pada masyarakat daerah yang bersangkutan. Seringnya perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

Jenis wisata budaya ini jenis yang populer di Indonesia. Jenis wisata ini adalah jenis wisata yang paling utama bagi wisatawan luar negeri yang datang ke negeri ini dimana mereka ingin mengetahui

kebudayaan kita, kesenian dan segala sesuatu yang dihubungkan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya kita.

b. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat alam arti jasmani dan rohani, dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara yang menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

c. Wisata Olahraga

Ini dimaksudkan wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olah raga di suatu tempat atau negara seperti Asean Games, Olympiade, Thomas dan Uber Cup, Wimbeldon, Tour de Fance, F1, World Cup dan jenis olahraga lainnya. Macam cabang olahraga yang termasuk dalam jenis wisata olahraga yang bukan tergolong dalam pesta olahraga atau games, misalnya berburu, memancing, berenang, dan berbagai cabang olahraga dalam air atau diatas pegunungan.

d. Wisata Komersial

Jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersil, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya. Pada mulanya banyak orang berpendapat bahwa hal ini tidak dapat digolongkan kedalam jenis pariwisata karena bersifat komersial, hanya dilakukan oleh orang-orang

yang khusus mempunyai tujuan tertentu untuk bisnis. Tetapi kenyataannya, dewasa ini pameran-pameran atau pekan raya yang diadakan banyak sekali dikunjungi oleh orang yang hanya sekedar melihat-lihat. Maka tak jarang pameran atau pekan raya dimeriahkan dengan berbagai atraksi dan pertunjukan kesenian.

e. Wisata industri

Erat kaitannya dengan wisata komersial. Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang biasa ke suatu kompleks atau daerah perindustrian yang banyak terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. Hal ini banyak dilakukan di negara-negara yang telah maju perindustriannya dimana masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke daerah atau kompleks-kompleks pabrik industri berbagai jenis barang yang dihasilkan secara massal di negara tersebut.

f. Wisata Politik

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti peringatan ulang tahun suatu negara/perayaan hari kemerdekaan dimana fasilitas akomodasi, sarana angkutan dan berbagai atraksi diadakan secara megah dan meriah bagi para pengunjung. Selain itu peristiwa-peristiwa penting seperti konferensi, musyawarah, kongres atau konvensi politik yang selalu disertai dengan darmawisata termasuk dalam jenis ini.

g. Wisata Konvensi

Termasuk dalam jenis wisata politik. Berbagai negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan beserta ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Contoh, Jakarta dengan JCC-nya (Jakarta Convention Center).

h. Wisata Sosial

Yang dimaksud dengan jenis wisata ini adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah (mereka yang tidak mampu membayar segala sesuatu yang bersifat luks) untuk mengadakan perjalanan.

i. Wisata Pertanian

Jenis wisata ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi ataupun hanya sekedar melihat-lihat.

j. Wisata Maritim (marina) atau Bahari

Jenis wisata ini banyak kaitannya dengan kegiatan di air seperti di danau, sungai, pantai, teluk atau laut lepas seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar dan lain-lain. Jenis wisata ini dapat juga disebut Wisata Tirta. Indonesia yang merupakan daerah kepulauan kaya akan wisata jenis ini.

k. Wisata Cagar Alam

Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat lain.

I. Wisata Buru

Jenis wisata ini banyak dilakukan di negara-negara yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah (memiliki izin). Pemerintah yang bijaksana mengatur wisata buru ini demi keseimbangan hidup satwa yang diburu agar tidak punah, dengan memperhitungkan perkembangbiakannya, antara yang lahir dan yang diburu tetap seimbang.

m. Wisata Pilgrim/Wisata Religi

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan agama, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat. Bisa dilakukan perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, makam-makam orang besar atau yang diagungkan.

n. Wisata Bulan Madu

Yang dimaksud dengan jenis wisata ini adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan suami istri, pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.

o. Wisata petualangan

Dikenal dengan istilah *adventure tourism*. Jenis wisata ini dilakukan oleh mereka yang ingin melakukan petualangan atau hal-hal yang menantang, seperti memasuki hutan belantara, mendaki tebing terjal,

bungy jumping, arung jeram, wisata kutub, wisata ruang angkasa dan lain sebagainya.

Selain jenis-jenis wisata tersebut, masih banyak lagi jenis wisata yang lain, tergantung kepada kondisi dan situasi perkembangan dunia kepariwisataan di suatu daerah atau negara yang ingin mengembangkan industri pariwisatanya. Hal ini tergantung pada selera atau daya kreativitas para profesional yang berkepentingan dalam industri pariwisata ini. Semakin kreatif dan banyak gagasan yang dimiliki, semakin bertambah pula bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 10 tahun 2009 bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam rangka penyelenggaraan pariwisata, industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik akibat adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis pemerintah, tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata.

Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi: Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran

seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, dan pantai. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Dalam kepariwisataan faktor manfaat dan kepuasan wisatawan berkaitan dengan "*tourism Resourch* dan *Tourist Service*. Objek dan atraksi wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang mempunyai daya tarik tersendiri yang mampu mengajak wisatawan berkunjung. Hal-hal yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata antara lain:

- a. *Natural Amenities*, adalah benda-benda yang sudah tersedia dan sudah ada di alam. Contoh; iklim, bentuk tanah, pemandangan alam, flora dan fauna, dan lainlain.
- b. *Man Made Supply*, adalah hasil karya manusia seperti benda-benda bersejarah, kebudayaan, dan religi.
- c. *Way of Life*, adalah tata cara hidup tradisional, kebiasaan hidup, adat istiadat seperti pembakaran mayat di Bali, upacara sekaten di Jogjakarta.
- d. *Culture*, adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di daerah objek wisata.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris adalah penelitian yang relevan untuk mendukung temuan penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. (Amiruddin dan Zainal Asikin : 2004).

Tabel 2.1

TINJAUAN EMPIRIS

No.	Nama / Judul / Tahun	Hasil
1.	Faizal Zulmi / Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung / 2018	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, jumlah hotel, jumlah restoran, dan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
2.	Mardianis dan Hanibal.S / Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci / 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, tetapi merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kerinci
3.	Fahrul / Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap	Dari hasil analisis dapat di simpulkan bahwa jumlah wisatawan dan tingkat

	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai / 2017	infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Sinjai periode tahun 2007-2016.
4.	Devilian Fitri / Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan / 2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Ahmar, Linda, Mustafa Muhani / Peranan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo / 2012	Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Menyatakan bahwa jumlah pendapatan sektor pariwisata Daerah Kota Palopo sebesar 70%.Pengaruh ini menunjukkan bahwa diantara kedua variabel memiliki hubungan kuat dan positif.

C. Kerangka Pikir

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Kontribusi Retribusi Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Periode 2009-2018”, adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Retribusi objek wisata. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
KERANGKA PIKIR

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Pariwisata dan Retribusi Pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (Abdul halim., 2001).

D. Hipotesis

Berdasarkan tujuan, tinjauan pustaka, dan kerangka konsep maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

Diduga bahwa retribusi objek wisata berkontribusi positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bone pada periode 2009 sampai 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya didominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain baik melalui buku-buku literatur atau buku bacaan lainnya seperti tulisan-tulisan ilmiah, teori-teori, diktat-diktat, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik kabupaten Bone.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Periode 2009-2018” dilaksanakan di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Bone dengan waktu penelitian kurang lebih satu bulan dimulai pada tanggal 10 Agustus sampai 10 September 2019.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan variabel bebasnya adalah retribusi objek wisata.

Penentuan variabel pada dasarnya adalah operasionalisasi terhadap konstruk, yaitu upaya mengurangi abstraksi konstruk sehingga dapat diukur. Define operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil pemungutan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan.

2. Retribusi objek wisata (X)

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari referensi yang berupa buku, majalah, artikel-artikel, data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian digunakan untuk menghitung seberapa besar kontribusi retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bone menggunakan data time series tahun 2009-2018 yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Retribusi Objek Wisata

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bone

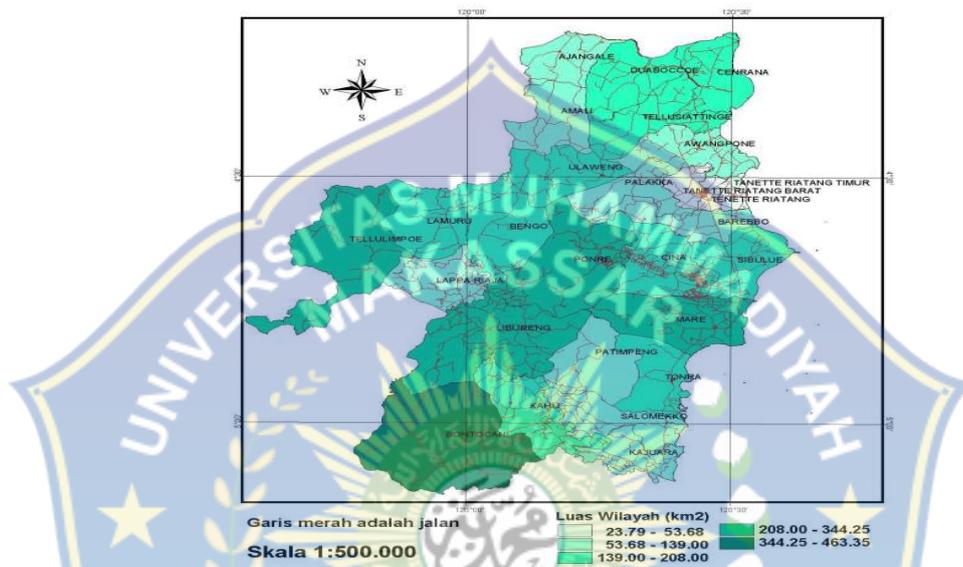
Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD). (Abdul Halim : 2004)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi geografis dan iklim kabupaten Bone



GAMBAR 4.1
PETA WILAYAH KABUPATEN BONE

Secara astronomis, Kabupaten Bone terletak pada posisi 4013' dan 5006' Lintang Selatan, serta 119042' dan 120040' bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bone memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Wajo, Selatan - Kabupaten Sinjai, Barat - Kabupaten Maros, dan Timur - Teluk Bone. Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 km² dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Bone terdiri dari: 0 m - 100 m = 39,88 %, 101 m - 500 m = 45,09 %, 501 m -1000 m = 12,70 %, 1.001 m keatas = 2,34 %. Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kecamatan sebanyak 27 kecamatan. Pada tahun 2014, tercatat 194 sungai mengalir di Kabupaten Bone dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Walanae yang berhulu di Kecamatan Bontocani, mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo, kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Panjang sungai tersebut mencapai 60 km khusus di wilayah Kabupaten Bone.

Ketinggian Tempat daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut :

Tabel 4.1

KETINGGIAN DAERAH DI KABUPATEN BONE

No.	Ketinggian (Meter)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-25	81.925,2	17,97%
2	25-100	101.620	22,29%
3	100-250	202.237,2	44,36%
4	250-750	62.460,6	13,74%
5	750>	40.080	13,76%
6	1000>	6.900	1,52%

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kab.Bone 2018*

Selain wilayah tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah Barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Jumlah curah hujan bulanan di Wilayah Bone bervariasi dengan rata-rata tahunan sebesar 201,25 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Juni yaitu 638 mm dengan banyaknya hari hujan sebanyak 23 hari. Bagian Timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir menjadikan Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke utara. Bagian barat dan selatan terdapat pegunungan dan perbukitan yang celah-celahnya terdapat aliran sungai.

Jenis Tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial Gleyhumus, Litosol, Regosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah mediteran seluas 67,6% dari total wilayah kemudian Renzina 9,59%, dan Litosol 9%. Penyebaran jenis tanahnya yaitu sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial. Kemiringan Lereng keadaan permukaan lahan bervariasi, mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, sementara di bagian Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga curam dengan rincian yaitu, kemiringan lereng 0-2% (datar) : 164.602 Ha (36,1%), kemiringan lereng 0-15% (landai dan sedikit bergelombang) : 91.519 Ha (20,07%), kemiringan lereng 15-40% (bergelombang) : 12.399 Ha (24,65%), kemiringan lereng >40% (curam) : 12.399 Ha (24,65%).

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 79% - 88% dengan temperatur berkisar 25,10C – 27,60C. Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe hujan Monsoon dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Monsoon memiliki

curah hujan tertinggi saat bertiup angin monsun Asia yaitu bulan Januari dan Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian barat. Tipe kedua memiliki kriteria pola hujan terbalik dengan pola monsoon, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Bone.

Tabel 4.2

RATA-RATA SUHU DAN KELEMBABAN UDARA MENURUT BULAN
DI KABUPATEN BONE 2018

Bulan	Suhu Udara Temperature (°C)	Kelembaban Udara Humidity (%)
Januari	27,6	80
Februari	26,2	83
Maret	26,3	83
April	26,4	82
Mei	25,6	85
Juni	25,2	88
Juli	25,1	87
Agustus	25,3	84
September	25,9	81
Oktober	27,1	79
November	26,6	81
Desember	27,0	82

Sumber : *BMKG Kabupaten Bone 2017*

2. Jumlah desa/kelurahan kabupaten Bone

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (hasil amandemen kedua), yaitu pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18, Ayat 1, dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau walikota yang melingkupi batas-batas wilayahnya. Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain. Tingkatan di bawah kecamatan adalah Kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan Desa dipimpin oleh seorang kepala desa.

Tabel 4.3

JUMLAH DESA/KELURAHAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BONE TAHUN 2018

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Bontocani	10	1
2	Kahu	19	1
3	Kajuara	17	1
4	Salomekko	7	1
5	Tonra	11	-
6	Patimpeng	10	-

Lanjutan Tabel 4.3

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
7	Libureng	18	2
8	Mare	17	1
9	Sibulue	19	1
10	Cina	11	1
11	Barebbo	17	1
12	Ponre	9	-
13	Lappariaja	9	-
14	Lamuru	11	1
15	Tellu Limpoe	11	-
16	Bengo	9	-
17	Ulaweng	14	1
18	Palakka	15	-
19	Awangpone	17	1
20	Tellu Siattinge	15	2
21	Amali	14	1
22	Ajangale	12	2
23	Dua Boccoe	21	1
24	Cenrana	15	1
25	Tanete Riattang Barat	-	8
26	Tanete Riattang	-	8
27	Tanete Riattang Timur	-	8
Jumlah		328	44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Bone 2018

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan pada tahun 2018. Adapun jumlah desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Bone memiliki jumlah yang berbeda-beda disetiap kecamatan.

3. Jumlah penduduk kabupaten Bone

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatic negara sahabat beserta keluarganya.

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui *e-census*. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi.

Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan

sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Tabel 4.4
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN BONE TAHUN 2009-2018

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2009	338.407.000	373.341.000	711.784.000
2010	341.614.000	376.068.000	717.682.000
2011	345.394.000	379.511.000	724.905.000
2012	347.203.000	382.313.000	729.516.000
2013	349.717.000	384.402.000	734.119.000
2014	352.081.000	386.432.000	738.515.000
2015	354.502.000	388.410.000	742.912.000
2016	356.691.000	390.282.000	746.977.000
2017	358.889.000	392.137.000	751.062.000
2018	422.818.000	441.236.000	863.654.000

Sumber : *Disdukcapil Kabupaten Bone (dalam angka)2018*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kabupaten Bone mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Jumlah penduduk biasanya dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi.

4. Potensi Pariwisata Kabupaten Bone

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini, seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap, turis adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan dll.

Peraturan daerah kabupaten bone nomor 5 tahun 2003 tentang retribusi izin operasional usaha kepariwisataan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bone, Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya daya guna dan hasil guna dibidang kepariwisataan sebagai sumber PAD yang potensial, maka perlu diadakan penyesuaian baik pengelolaan maupun tarif Retribusi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Operasional Usaha Kepariwisatan.

Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan *pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang*

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, memiliki misi mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan. Dengan tujuan meningkatkan investasi, pengembangan industri, koperasi UMKM, perdagangan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta penerima devisa. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional. Di Sulawesi Selatan yang juga merupakan salah satu daerah tujuan wisata di wilayah Indonesia secara khusus di Kabupaten Bone terdapat banyak obyek wisata yang sangat potensial dan tentu sangat berpengaruh dalam kinerja perekonomian Kabupaten Bone. Kabupaten Bone merupakan tujuan wisata yang cukup diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Ada beberapa objek wisata yang terdapat di kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

OBJEK WISATA DI KABUPATEN BONE

No.	Wisata Budaya	Wisata Alam	Wisata Kuliner
1	Bola Soba'	Tanjung Palette	Ratu Lingga Resto n Café
2	Museum Saoraja	Desa Garencing	RC Teras

3	Makam Raja-Raja di Bukaka	Pantai Cappa Ujung	Victoria Bone
4	Makam Raja-Raja di Lalebata	Permandian Bonto Jai	La Galigo
5	Alun-Alun Lap.Merdeka	Permandian Aling'e	Selera Nelayan
6	Goa Mampu	Permandian Lanca	Boon Bakery
7	Goa Janci	Air Panas Saweng	Lattekko
8	Goa Arung Palakka	Taretta	Kedai Rakyat
9	Pattaneng Punga	Bendungan Salomekko	Lapangan Merdeka
10	Taman Bunga	Puncak Lima Jari	Latanete

Sumber : *Dinas Pariwisata Kabupaten Bone 2018*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan beberapa objek wisata yang terdapat di kabupaten Bone termasuk wisata budaya, wisata alam dan wisata kuliner. Sektor pariwisata yang sangat potensial memberikan kontribusi atau devisa terhadap perekonomian, besarnya kontribusi tersebut ditentukan oleh besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung, wisatawan sendiri terdiri atas wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Wisatawan lokal adalah wisatawan yang berkunjung ke lokasi objek wisata yang ada di daerahnya sendiri, wisatawan domestik adalah wisatawan yang datang dari luar daerah, sedangkan wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang berasal dari luar negara atau yang sering disebut wisatawan asing. Semakin banyak wisatawan maka akan semakin besar penerimaan daerah. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.6
JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN BONE
TAHUN 2013-2017

Tahun	Wisatawan			Jumlah
	Lokal	Domestik	Mancanegara	
2013	54 181	36 069	871	91 121
2014	85 246	35 672	475	121 393
2015	80 382	30 116	584	111 082
2016	91 800	31 200	500	123 500
2017	96 140	31 200	460	127 800

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bone 2018

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Keberhasilan dalam bidang kepariwisataan dicerminkan dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke Bone dari tahun ke tahun. Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi dengan berbagai jenis wisata alam maupun wisata budaya. Salah satu objek wisata yang paling populer di kabupaten Bone adalah wisata Tanjung Pallette.

Tanjung yang berhadapan langsung dengan teluk Bone tersebut, telah tertata rapi dilengkapi dengan panorama alam yang memukau. Tak seperti pantai pada umumnya yang menawarkan keindahan pasir putih. Namun tempat wisata ini memiliki khas tersendiri. Tumbuhan rindang diatas bukit karang serta tebing yang dihiasi akar pohon, memberikan suatu nuansa yang berbeda.

Dibalik keindahan pemandangan yang dimilikinya, menurut cerita rakyat yang turun temurun, Tanjung Palette Bone sejatinya adalah tempat *mallabutau*, yang dalam bahasa Bugis berarti tempat menenggelamkan orang. Pada masa kerajaan Bone, Tanjung Palette ini menjadi lokasi untuk menenggelamkan orang-orang yang melakukan pelanggaran yang berat yaitu melakukan perselingkuhan. Mereka yang telah berkeluarga namun berselingkuh akan diikat bersama lalu dibuang di sana.

Obyek wisata di Kabupaten Bone mempunyai potensi dalam peningkatan pendapatan daerah, maka dari itu perlu pengelolaan, pembenahan dan perhatian khusus terutama pada sarana prasarana penunjang pariwisata agar potensi pariwisata dapat terus dikembangkan dan semakin maju.

5. Perekonomian kabupaten Bone

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD,

mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Bone mencapai 280,48 miliar rupiah meningkat 55,70 persen dari tahun 2016 Kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 Pada tahun 2017 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 12,74 persen sedangkan tahun 2016 sebesar 8,82 persen Penyumbang PAD adalah pajak daerah 15,95 persen, retribusi daerah 4,54 persen, bagian laba usaha daerah 2,40 persen dan lain-lain pendapatan asli daerah yang mencapai 77,11 persen. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.7

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
MENURUT JENIS PENDAPATAN TAHUN 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah	180.148.967.473,17	280.478.099.485,46
1. Pajak Daerah	37.605.711.246,50	44.726.076.045,25
2. Retribusi Daerah	11.336.148.488,00	12.734.571.559,00
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.179.816.872,00	6.727.965.905,22
4. Lain-lain PAD yang sah	127.027.290.866,67	216.289.485.975,99
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.540.620.696.554,00	1.512.633.984.416,00
1. Bagi hasil Pajak	33.127.662.678,00	25.088.967.702,00
2. Bagi hasil bukan pajak	18.987.267.650,00	6.318.272.647,00
3. Dana alokasi umum	1.088.618.062.000,00	1.069.494.543.000,00
4. Dana alokasi khusus	399.887.704.226,00	411.732.201.067,00
Pendapatan Transfer	202.773.125.000,00	306.700.190.600,00

Pemerintah Pusat Lainnya		
1. Dana otonomi khusus	0,00	0,00
2. Dana penyesuaian	202.773.125.000,00	306.700.190.600,00
Pendapatan Transfer	75.918.025.272,00	76.881.029.359,00
Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Pendapatan bagi hasil pajak	75.918.025.272,00	76.881.029.339,00
2. pendapatan bagi hasil lainnya	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	32.022.540.166,00	25.006.372.800,00
Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi	32.022.540.166,00	25.006.372.800,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	321.751.879.398,00	25.066.372.800,00
1. Pendapatan Hibah	11.038.188.960,00	-
2. Dana darurat	-	-
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	75.918.025.272,00	-
4. Dana penyesuaian dan otonomi daerah	202.773.125.000,00	-
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	32.022.540.166,00	-
6. Lainnya	-	-
Jumlah	2.042.521.543.425,17	2.201.699.676.660,46

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah 2018

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencukupi keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan,

maka dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Bone dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bone. berikut ini data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 4.8

PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2009-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	39.201.846.144,42	-
2010	34.842.143.749,72	-11,12%
2011	33.780.847.477,28	-3,04%
2012	52.347.658.040,42	54,96%
2013	85.874.602.728,88	64,04%
2014	155.427.196.665,96	80,99%
2015	159.777.772.085,62	2,79%
2016	180.148.967.473,17	12,74%
2017	280.478.099.485,46	55,69%
2018	214.246.216.580,41	-23,61%

Sumber : BPS Kabupaten Bone 2018 (Data Diolah)

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yakni tahun 2009 sampai tahun 2018, pendapatan asli daerah menunjukkan pergerakan yang fluktuatif hal ini disebabkan karena kurang efektifnya realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Bone seperti penarikan retribusi yang belum optimal, namun demikian kontribusi PAD dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup baik meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 23,61%, kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap tingkat kemandirian kabupaten Bone sehingga diperlukan berbagai kebijakan pengembangan dan peningkatan kemandirian daerah agar target dan realisasi dapat dipenuhi.

Retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Dalam retribusi yang dijadikan alternatif bagi pemerintah adalah penggunaan jasa oleh masyarakat. Dimana tingkat penggunaan jasa sendiri dapat dikatakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan. Untuk itu, dalam penetapan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi ataupun badan yaitu tingkat perkalian jumlah penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Maka disimpulkan bahwa besarnya tarif yang digunakan adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya

retribusi yang terutang. Retribusi objek wisata merupakan sumber penerimaan objek pariwisata yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, penyelaman dasar laut dan pendapatan lain-lain yang sah yang berasal dari obyek pariwisata tersebut. Secara umum yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah atas segala pembayaran jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Berikut ini pada tabel 4.9 untuk mengetahui seberapa besar retribusi objek wisata kabupaten Bone.

Tabel 4.9
RETRIBUSI OBJEK WISATA KABUPATEN BONE
TAHUN 2009-2018

Tahun	Retribusi Objek Wisata (Rp)	Kontribusi (%)
2009	310.041.440.00	-
2010	291.128.912.00	-6,10%
2011	284.439.000.00	-2,29%
2012	212.884.000.00	-25,15%
2013	234.554.000.00	10,17%
2014	239.854.000.00	2,25%
2015	226.432.000.00	-5,59%
2016	227.611.000.00	0,52%
2017	297.800.000.00	30,83%
2018	764.351.000.00	156,66%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah 2018 (Data Diolah)

Retribusi objek wisata di kabupaten Bone mengalami perubahan yang beragam dimana pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2010 sampai tahun 2012 dan pada tahun 2012 penurunan bahkan mencapai 25,15% dari tahun 2011. Namun kemudian pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2016 sampai tahun 2018 retribusi objek wisata naik dari angka 227.611.000,00 pada tahun 2016 menjadi 764.351.000,00 pada tahun 2018 atau peningkatan dari 0,52% dari tahun 2016 menjadi 156,66% pada tahun 2018.

6. Analisis Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap PAD

Hasil penelitian penggambaran tentang hasil yang diperoleh dalam kuantitatif. Dalam penelitian ini juga termasuk data yang diperoleh yaitu retribusi objek wisata dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Bone, Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Objek Wisata dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone dari tahun 2009 sampai tahun 2018 dengan hasil olahan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Objek Wisata}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$2009 = \frac{310.041.440.00}{39.201.846.144,42} \times 100\% = 0,79\%$$

$$2010 = \frac{291.128.912.00}{34.842.143.749,72} \times 100\% = 0,83\%$$

$$2011 = \frac{284.439.000.00}{33.780.847.477,28} \times 100\% = 0,84\%$$

$$2012 = \frac{212.884.000.00}{52.347.658.040,42} \times 100\% = 0,40\%$$

$$2013 = \frac{234.554.000.00}{85.874.602.728,88} \times 100\% = 0,27\%$$

$$2014 = \frac{239.854.000.00}{155.427.196.665,96} \times 100\% = 0,15\%$$

$$2015 = \frac{226.432.000.00}{159.777.772.085.62} \times 100\% = 0,14\%$$

$$2016 = \frac{277.611.000.00}{180.148.967.473.17} \times 100\% = 0,12\%$$

$$2017 = \frac{297.800.000.00}{280.478.099.485.46} \times 100\% = 0,10\%$$

$$2018 = \frac{764.351.000.00}{214.246.216.580.41} \times 100\% = 0,35\%$$

Tabel 4.10

HASIL ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP PAD
DI KABUPATEN BONE TAHUN 2009-2018

Tahun	Retribusi Objek Wisata (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	310.041.440.00	39.201.846.144.42	0,79
2010	291.128.912.00	34.842.143.749.72	0,83
2011	284.439.000.00	33.780.847.477.28	0,84
2012	212.884.000.00	52.347.658.040.42	0,40
2013	234.554.000.00	85.874.602.728.88	0,27
2014	239.854.000.00	155.427.196.665.96	0,15
2015	226.432.000.00	159.777.772.085.62	0,14
2016	277.611.000.00	180.148.967.473.17	0,12
2017	297.800.000.00	280.478.099.485.46	0,10
2018	764.351.000.00	214.246.216.580.41	0,35

Sumber : BPS kabupaten Bone 2018 (Data Diolah)

B. Pembahasan

Berdasarkan Tabel 4.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009 sampai 2018 bergerak fluktuatif, dimana pada tahun 2010 sebesar 11,12%, 2011 sebesar 3,04%, 2012 sebesar 54,96%, 2013 sebesar 64,04%, 2014 sebesar 80,99%, 2015 sebesar 2,79%, 2016 sebesar 12,74%, 2017 sebesar 55,69%, dan pada tahun 2018 sebesar 23,61%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat kontribusi sebesar 80,99%.

Dan pada tabel 4.9 retribusi objek wisata pada tahun 2009 sampai 2018 bergerak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi objek wisata pada tahun 2010 sebesar 6,10%, 2011 sebesar 2,29%, 2012 sebesar 25,15%, 2013 sebesar 10,17%, 2014 sebesar 2,25%, 2015 sebesar 5,59%, 2016 sebesar 0,52%, 2017 sebesar 30,83%, dan pada tahun 2018 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 156,66%. Hal ini menunjukkan kontribusi yang objek wisata berpengaruh positif dan mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kab. Bone periode 2009 sampai 2018 cukup baik. Berdasarkan hasil analisis data pada tahun 2009 kontribusi sebesar 0,79%, tahun 2010 kontribusi sebesar 0,83%, tahun 2011 kontribusi sebesar 0,84%, tahun 2012 sebesar 0,40%, pada tahun 2013 sebesar 0,27%, tahun 2014 sebesar 0,15%, pada tahun 2015 sebesar 0,14%, tahun 2016 sebesar 0,12%, tahun 2016 sebesar 0,10%, tahun 2018 sebesar 0,35%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan bergerak signifikan.

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, retribusi menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasikan pendapatan asli daerah.” Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (Darwin, 2010:68).

Salah satu penyebab rendahnya kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah ialah masih banyaknya objek wisata yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga objek wisata kebanyakan tidak terkelola dengan baik, yang berakibat kurangnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata baik melalui parkir maupun biaya masuk objek wisata. Pengolahan penerimaan daerah setidaknya harus dikelola secara cermat, tepat dan penuh dengan kehati-hatian.

Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat di dalam sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki Sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Disamping hal tersebut, pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetorkan ke dalam kas pemerintah daerah dan di salahgunakan oleh petugas di lapangan. Dan perlunya pula diteliti dengan saksama kepada masyarakat yang tidak membayar dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya dengan tegas (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah daerah berinisiatif untuk mengelola objek wisata yang berpotensi memberikan kontribusi retribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Sehingga penerimaan retribusi pariwisata dapat meningkat serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah membuahkan hasil dalam tiga tahun terakhir, dimana pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Meskipun pergerakannya tidak terlalu tinggi namun setiap tahun baik retribusi objek wisata maupun pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Namun berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devilian Fitri yang berjudul “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan” pada tahun 2014, adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa “tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesisir Selatan”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kab. Bone adalah sebagai berikut :

1. kontribusi retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bone periode 2009 sampai 2018 berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kontribusi pada tahun 2017 sebesar 0,10% mengalami peningkatan sebesar 0,35% pada tahun 2018.
2. Kontribusi retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan hal ini dilihat dari semakin meningkatnya jumlah objek wisata di kabupaten Bone.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bone hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan tercatat di dalam sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki Sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan kepada seluruh elemen yang terlibat agar berperan aktif dalam mengembangkan potensi pariwisata agar tercipta kemandirian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Arjana, I Gusti Bagus. 1999. *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Ragam Implikasinya*. Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata Universitas Udayana Denpasar 3 Agustus 1999.
- Arjana, I Gusti Bagus. 2016. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jilid II. Rajawali Pers : Jakarta.
- Bone.GO.ID. 2016. *Potensi Wisata Kabupaten Bone*, (online), (<https://bone.go.id/2016/04/10/potensi-wisata-kabupaten-bone/>, diakses 10 April 2019).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2016.(online) (<https://sulsel.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjekViewTab3>, diakses 12 agustus 2016).
- Bone, Tribun. 2018. Kontribusi Wisata Tanjung Pallette. *Baru-5-bulan-wisata-tanjung-palette-sumbang-pad-bone-rp-500-juta*,(online), <http://makassar.tribunnews.com/2018/06/07/baru-5-bulan-wisata-tanjung-palette-sumbang-pad-bone-rp-500-juta>, diakses 7 Juni 2018).
- Duwi, Consultant. 2011. *Analisis Regresi Linear sederhana*, (online), (<http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linier-berganda.html>], diakses November 2011).
- Darwin. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1976/1977. *Geografi Budaya Daerah Sulawesi Selatan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Faizal, zulmi. 2018. *Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Lampung*, Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Fitri Devilian. 2014. *Pengaruh Sektor Pariwisata dalam Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan. Padang. Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Halim, Abdul. 2001. *Rumus Kontribusi*. Fakultas Ekonomi: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta

- Halim.A. dan Nasir.J.A. 2006. *Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*. Salemba Empat : Jakarta.
- HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Juli, P.S. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Koen, Meyers. 2009. *Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata*. Unesco Office : Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi : Yogyakarta.
- Muhani et al.,2012. Peranan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapata Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium*. Vol.2
- Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Purnomo, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga : Jakarta.
- Rahim, Firmansyah. 2013. *Kebijakan Pembangunan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Perspektif MP3EI*. Makalah Seminar Nasional Pembangunan Pariwisata pasca sail komodo, Kupang, 9 Desember 2014.
- Sanitasi.Net. 2010. *Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan* (<http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-10-tahun-2009-tentang-kepariwisataan.html>). (online). Jakarta Indonesia.
- Soraya, Rasyid. 2011. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah*. Alauddin Press : Makassar.
- Syartika, H., dan Mardianis. 2018. Final kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. *Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (pad) Di kabupaten kerinci (the contribution of tourism sector to local revenue in kerinci regency)*, Vol. 9, No.1.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan *united Nations Confrence on Trade and Development (UNCTAD)* <Http://fe.unpad.ac.id/id/arsip-fakultas-ekonomi-unpad/opini/2198-pilar-pilar-ekonomi-kreatif> (online) diakses pada Mei 2014.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yani. Ahmad. 2002. *Analisis Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. PT. Rajawali : Jakarta.

Yani.Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Salemba Empat : Jakart



Lampiran 1

Data Penelitian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Retribusi Objek Wisata (Rp)
2009	39.201.846.144,42	310.041.440.00
2010	34.842.143.749,72	291.128.912.00
2011	33.780.847.477,28	284.439.000.00
2012	52.347.658.040,42	212.884.000.00
2013	85.874.602.728,88	234.554.000.00
2014	155.427.196.665,96	239.854.000.00
2015	159.777.772.085,62	226.432.000.00
2016	180.148.967.473,17	227.611.000.00
2017	280.478.099.485,46	297.800.000.00
2018	214.246.216.580,41	764.351.000.00

Lampiran 2

Rumus Analisis Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Objek Wisata}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$2009 = \frac{310.041.440.00}{39.201.846.144,42} \times 100\% = 0,79\%$$

$$2010 = \frac{291.128.912.00}{34.842.143.749,72} \times 100\% = 0,83\%$$

$$2011 = \frac{284.439.000.00}{33.780.847.477,28} \times 100\% = 0,84\%$$

$$2012 = \frac{212.884.000.00}{52.347.658.040,42} \times 100\% = 0,40\%$$

$$2013 = \frac{234.554.000.00}{85.874.602.728,88} \times 100\% = 0,27\%$$

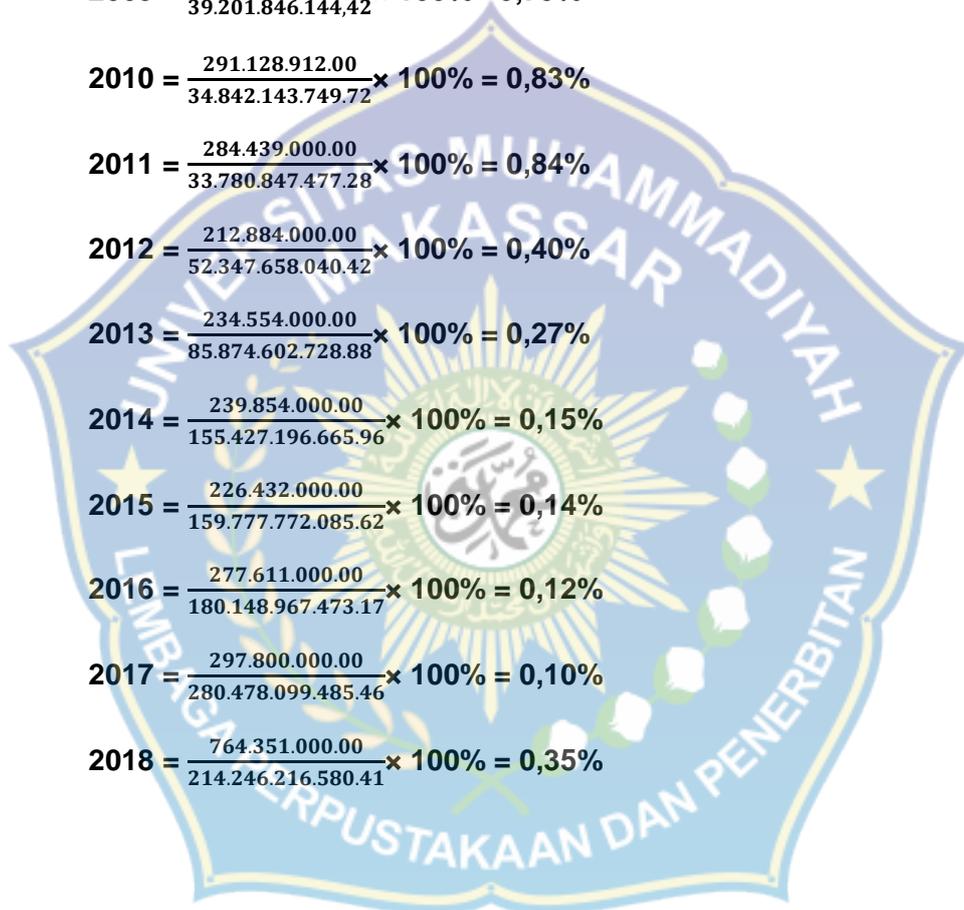
$$2014 = \frac{239.854.000.00}{155.427.196.665,96} \times 100\% = 0,15\%$$

$$2015 = \frac{226.432.000.00}{159.777.772.085,62} \times 100\% = 0,14\%$$

$$2016 = \frac{277.611.000.00}{180.148.967.473,17} \times 100\% = 0,12\%$$

$$2017 = \frac{297.800.000.00}{280.478.099.485,46} \times 100\% = 0,10\%$$

$$2018 = \frac{764.351.000.00}{214.246.216.580,41} \times 100\% = 0,35\%$$



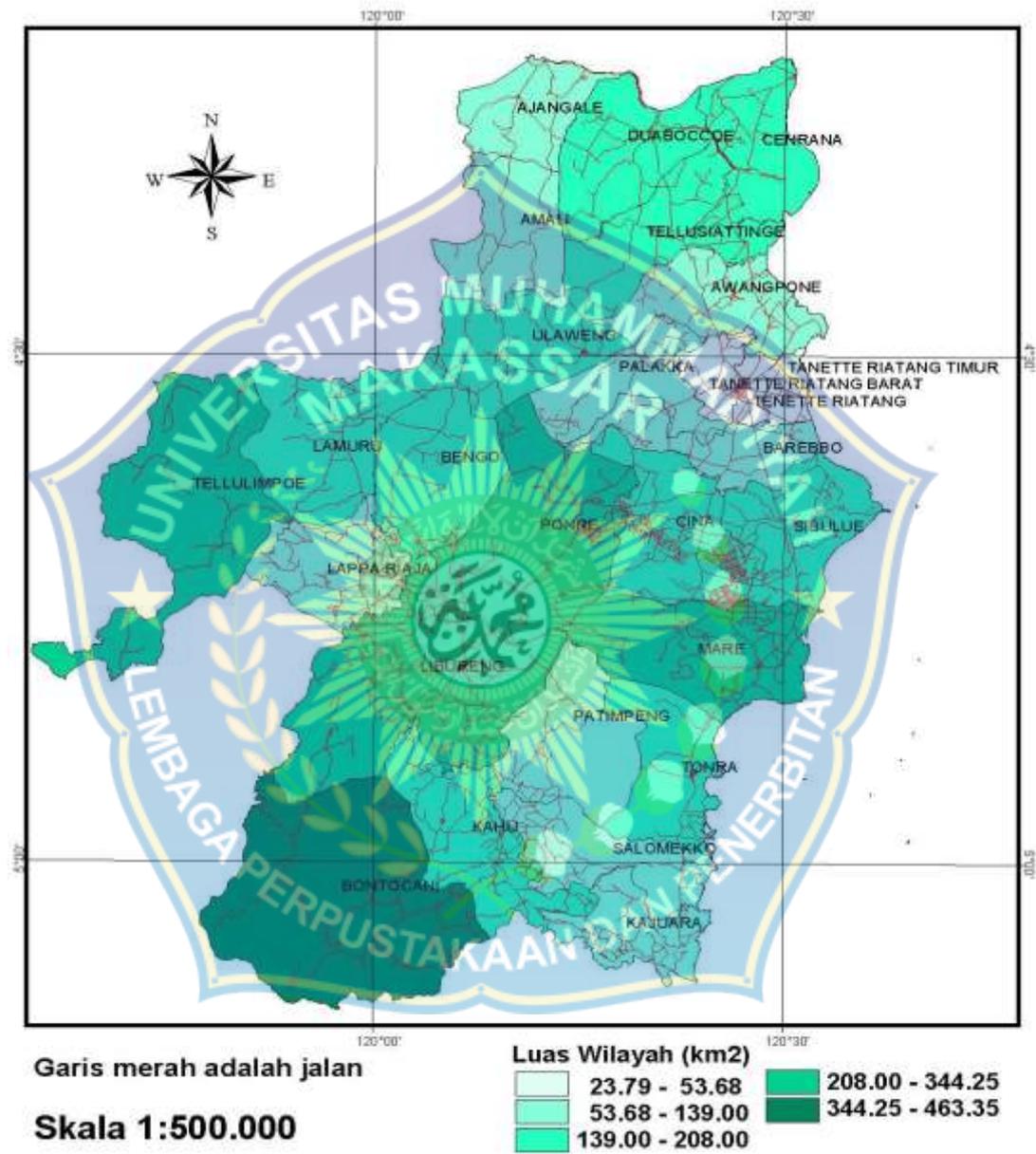
Lampiran 3

Hasil Analisis

Tahun	Retribusi Objek Wisata (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2009	310.041.440.00	39.201.846.144.42	0,79
2010	291.128.912.00	34.842.143.749.72	0,83
2011	284.439.000.00	33.780.847.477.28	0,84
2012	212.884.000.00	52.347.658.040.42	0,40
2013	234.554.000.00	85.874.602.728.88	0,27
2014	239.854.000.00	155.427.196.665.96	0,15
2015	226.432.000.00	159.777.772.085.62	0,14
2016	277.611.000.00	180.148.967.473.17	0,12
2017	297.800.000.00	280.478.099.485.46	0,10
2018	764.351.000.00	214.246.216.580.41	0,35

Lampiran 4

Peta Wilayah Kabupaten Bone



Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian



BIOGRAFI PENULIS



Novia Sasmita lahir di Bone pada tanggal 15 November 1997 sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Mustafa dan Ibu Rahmatia. Penulis selama masa perkuliahan tinggal di Jl. Borong Raya Komp. Delta Mas 2 blok B no.1 Kota Makassar. Penulis telah menempuh pendidikan sebagai berikut, penulis masuk MI Ibadurrahman Unra, dan lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Awangpone dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat atas di MAN 1 Watampone dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar program strata satu sampai sekarang. Sebagai tugas akhir, maka penulis menulis sebuah skripsi yang berjudul “Kontribusi Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Periode 2009-2018”.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN